

TRANSFORMASI SUMBER DAYA INSANI MENUJU MASYARAKAT INKLUSIF: ANALISIS KETERKAITAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SDG 1

Adri, Ferdi Prayoga, Fofi Hanifa Seftiani

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

addes78231@gmail.com, Prayogaferdi490@gmail.com, seftiani769@gmail.com

ABSTRACT

This study analyses the relationship between the strengthening of Human Resources (HR) and the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 1: No Poverty, through the lens of inclusive development and Islamic values. Human Resources are positioned as the cornerstone of sustainable human development, encompassing spiritual, intellectual, social, psychological and economic dimensions. This research employs a library-based approach, examining the literature, reports from global institutions, and concepts of human development within the Islamic intellectual tradition. The results of the analysis indicate that the transformation of HR has both direct and indirect effects on poverty reduction through increased productivity, the expansion of financial literacy, the strengthening of households' adaptive capacity, and the formation of a more inclusive society. The study formulates a comprehensive conceptual framework and offers policy recommendations to optimise the contribution of HR to sustainable national socio-economic development.

Keywords: Human Resources, SDG 1, poverty, inclusive society, Islamic human development.

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis keterkaitan antara penguatan Sumber Daya Insani (SDI) dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 1: Tanpa Kemiskinan melalui perspektif pembangunan inklusif dan nilai-nilai Islam. SDI diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia berkelanjutan, yang mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan menelaah literatur, laporan lembaga global, serta konsep-konsep pembangunan manusia dalam khazanah pemikiran Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi SDI memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas, perluasan literasi keuangan, penguatan kapasitas adaptif rumah tangga, serta pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan merumuskan kerangka konseptual yang komprehensif dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan kontribusi SDI dalam pembangunan sosial-ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sumber Daya Insani, SDGs 1, kemiskinan, masyarakat inklusif, pembangunan manusia Islam.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan isu global yang menempati posisi utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu tujuan yang paling mendesak adalah SDGs 1: Tanpa Kemiskinan, yang bertujuan menghapus kemiskinan

ekstrem, memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, dan memastikan akses terhadap sumber daya produktif (Opoku et al., 2024),(Trimurti & Dhyana, 2025). Kemiskinan, sebagai fenomena multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh kekurangan aset ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan, terbatasnya literasi finansial, serta minimnya partisipasi sosial (Alkire, 2015), (Cahyadi et al., 2020).

Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia didasarkan pada konsep insan kamil, yaitu manusia yang seimbang secara spiritual, intelektual, moral, dan sosial (Kahf, n.d.),(Rahmawaty, n.d.). Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh kualitas ketakwaannya dan kemampuannya berkontribusi pada kehidupan sosial (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13) (Departemen Agama RI, 2019). Dengan demikian, transformasi SDI bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga agenda moral dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadaban (HAMKA, 1982).

Relevansi SDI dengan agenda pengentasan kemiskinan juga sejalan dengan teori pembangunan manusia modern yang dikembangkan Amartya Sen, yang menekankan *capability expansion* sebagai inti pembangunan (Sen, 1999). Dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti *'adl, ihsan, ta'awun*, dan *maslahah* turut memperkuat dimensi sosial pembangunan manusia (Fuaidi, 2024). Oleh karena itu, penguatan SDI menjadi komponen krusial dalam menciptakan masyarakat inklusif dan mengurangi kemiskinan struktural.

Meskipun telah banyak penelitian tentang SDGs dan kemiskinan, kajian yang mengintegrasikan SDI—khususnya berdasarkan nilai Islam—dalam konteks pencapaian SDGs 1 masih terbatas. Oleh karena itu, makalah ini berusaha mengisi celah literatur dengan menganalisis bagaimana transformasi SDI dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pembentukan masyarakat inklusif. SDI merujuk pada keseluruhan potensi manusia yang mencakup aspek spiritual, intelektual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam literatur internasional, konsep ini sejalan dengan *Human Capital Theory*. (Becker, 1993) yang menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan keterampilan meningkatkan produktivitas ekonomi (G. Becker, 1993). Namun, SDI memperluas cakupan tersebut dengan menambahkan dimensi akhlak dan spiritual.

Perspektif Islam menekankan SDI sebagai amanah Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Tin (95): 4 bahwa manusia diciptakan “dalam bentuk sebaik-baiknya”(Departemen Agama RI, 2019). Ini menegaskan bahwa kualitas manusia harus dikembangkan secara menyeluruh, baik fisik maupun spiritual.

Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menyediakan kesempatan setara bagi seluruh anggota, tanpa diskriminasi berbasis gender, disabilitas, kelas sosial, atau etnis. Konsep ini berkembang melalui teori inklusi sosial (Silver, 2015), yang menekankan bahwa pembangunan harus membuka akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan sosial, dan partisipasi politik. SDGs 1 bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem dan

membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Menurut World Bank (2023), kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan modal sosial (Global, 2023).

Konsep ini sejalan dengan lima maqasid utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Transformasi SDI merupakan kunci menjaga kelima maqasid tersebut dalam ranah sosial dan ekonomi (Rukyah, 2021),

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*, yaitu metode kajian pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang kredibel dan relevan. Sumber mencakup jurnal, buku akademik mutakhir, laporan lembaga global seperti UNDP dan World Bank, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer yang memberikan perspektif normatif dan historis (Sugiyono, 2019). Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, memungkinkan peneliti untuk menggali dan menginterpretasi konsep serta temuan empiris secara mendalam. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* (Zed, 2018), yakni teknik analisis isi yang berfokus mengidentifikasi tema, pola pikir, serta hubungan konseptual antara tiga elemen utama penelitian: Sumber Daya Insani (SDI), masyarakat inklusif, dan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan). Melalui pendekatan ini, penelitian memperoleh fondasi teoretis yang komprehensif dan mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel secara sistematis dan mendalam (Lexy J. Moleong, 2017).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

SDI sebagai Fondasi Pembangunan Manusia

SDI tidak hanya dipahami sebagai dimensi ekonomi, tetapi meliputi keseluruhan kapasitas manusia dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku secara etis. Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi intelektual, moral, sosial, dan spiritual untuk mendorong perubahan. SDI yang kuat berarti individu mampu mengambil keputusan rasional, bekerja produktif, beradaptasi dengan perubahan, serta menjunjung nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, SDI menjadi fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, SDI menjadi pilar utama pembangunan karena: (a) SDI menentukan produktivitas tenaga kerja; (b) SDI memengaruhi partisipasi sosial dan politik; (c) SDI berpengaruh pada kemampuan inovasi dan adaptasi; (d) SDI membentuk kualitas kepemimpinan nasional (Agita & Sailesh, 2024).

Dalam perspektif Islam, penguatan Sumber Daya Insani (SDI) merupakan proses holistik yang menuntut integrasi antara akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi, sehingga pengembangan kapasitas diri bukan sekadar peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga

penanaman nilai moral yang membimbing setiap Tindakan (Melisa Tiran, 2023). Al-Ghazali menegaskan bahwa pembangunan manusia harus memadukan ‘ilm (pengetahuan) dan ‘amal (pengamalan), karena pengetahuan yang tidak diwujudkan dalam perilaku nyata akan kehilangan nilai dan tidak memberikan manfaat sosial (Asutay, 2025). Menurutnya, ilmu berfungsi sebagai cahaya yang mengarahkan amal, sementara amal menjadi bukti konkret kesempurnaan ilmu. Oleh sebab itu, transformasi SDI tidak cukup hanya melalui pendidikan formal atau pelatihan teknis, tetapi harus disertai pembinaan karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan etika kerja. Integrasi nilai-nilai ini menjadi fondasi terbentuknya pribadi yang produktif, bermoral, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Ismawati Saragih, 2025). Dengan demikian, penguatan SDI dalam Islam mendorong terciptanya individu yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga mampu mendukung pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan..

Transformasi SDI Menuju Masyarakat Inklusif

Transformasi SDI melibatkan tiga komponen utama:

1. Transformasi Spiritual

Menanamkan nilai kejujuran, empati, amanah, dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi penting dalam pembentukan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas. Kejujuran berperan sebagai prinsip moral yang menjaga integritas individu dalam bertindak, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan mendorong terciptanya kepercayaan dalam hubungan sosial maupun profesional. Empati membantu seseorang memahami kondisi dan perasaan orang lain, yang pada gilirannya menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial (Muhammed Umer Chapra, 2000). Nilai amanah menegaskan pentingnya menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh komitmen, serta menjaga kepercayaan yang diberikan (M. Kahf, 2003). Sementara itu, tanggung jawab sosial mendorong individu untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Integrasi nilai-nilai ini tidak hanya menghasilkan pribadi berakhlak mulia, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan produktif (Ismawati Saragih, 2025). Dalam konteks pembangunan inklusif, penanaman nilai-nilai tersebut menjadi pendorong utama terciptanya masyarakat yang adil, peduli, dan mampu bekerja sama dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

2. Transformasi Intelektual

Melalui pendidikan berkualitas, pelatihan, keterampilan digital, dan literasi keuangan, kapasitas individu dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi modern. Pendidikan berkualitas menyediakan dasar pengetahuan, sikap ilmiah, dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial-ekonomi. Pelatihan berfungsi memperdalam kompetensi teknis sekaligus mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja yang semakin

kompetitif (OECD, 2021). Di era transformasi digital, penguasaan keterampilan digital menjadi keharusan karena banyak aktivitas ekonomi, layanan publik, dan peluang usaha bergeser ke platform berbasis teknologi (UNDP, 2022). Sementara itu, literasi keuangan memberikan kemampuan untuk mengelola pendapatan, menabung, menghindari risiko pembiayaan, serta membuat keputusan ekonomi yang bijak. Kombinasi keempat elemen ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga. Secara keseluruhan, investasi pada aspek-aspek tersebut merupakan strategi efektif untuk mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan (Al-azhar et al., 2025).

3. Transformasi Sosial-Ekonomi

Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, modal usaha, teknologi, dan jaringan pasar merupakan prasyarat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, alat produksi, atau sarana pendukung usaha memberikan fondasi bagi individu untuk memulai aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (G. Becker, 1993). Di sisi lain, ketersediaan modal usaha, baik melalui pembiayaan mikro, kredit berbasis komunitas, maupun skema pembiayaan syariah, memungkinkan pelaku usaha kecil mengembangkan kapasitas produksi dan meningkatkan skala bisnis mereka. Teknologi, termasuk digitalisasi proses usaha, pemasaran daring, dan penggunaan aplikasi keuangan, mempercepat efisiensi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selain itu, keberadaan jaringan pasar yang kuat membantu pelaku usaha terhubung dengan konsumen, distributor, dan rantai pasok yang lebih luas (Trimurti & Dhyana, 2025). Kombinasi empat aspek ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pencapaian masyarakat inklusif.

Ketiga transformasi ini saling terkait dan menghasilkan masyarakat yang lebih inklusif, yakni masyarakat yang membuka ruang bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi dan berkembang.

SDI dan Pengentasan Kemiskinan: Jalur Pengaruh Langsung

SDI memengaruhi penurunan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan produktivitas merupakan faktor kunci dalam mendorong kesejahteraan ekonomi, terutama bagi individu dan komunitas berpenghasilan rendah. Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan seseorang menghasilkan *output* yang lebih besar dengan waktu, tenaga, dan sumber daya yang sama. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan (G. Becker, 1993). Pendidikan memberikan landasan pengetahuan yang kuat, sementara pelatihan keterampilan teknis maupun *soft skills*

memperkuat kemampuan seseorang untuk bekerja lebih efisien, kreatif, dan kompetitif (Hamid, 2018), (Lidya & Akbar, 2013).

Ketika tingkat pendidikan dan keterampilan meningkat, peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi juga semakin besar. Individu dapat mengakses sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif, seperti industri modern, jasa profesional, dan usaha berbasis teknologi (Dec & Broniewicz, 2020). Selain itu, peningkatan kompetensi mendorong inovasi dalam usaha mikro dan kecil, sehingga dapat memperluas pasar dan menaikkan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan pendidikan dan keterampilan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

2. Kemampuan berwirausaha merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Individu yang memiliki kapasitas tinggi—meliputi pengetahuan, keterampilan manajerial, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan—lebih mampu menciptakan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Mereka dapat mengidentifikasi peluang pasar, mengelola risiko, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan nilai tambah (Rohmana, 2022).

Selain itu, kemampuan berwirausaha memungkinkan seseorang untuk tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan formal, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja bagi orang lain. Individu dengan kapasitas kewirausahaan yang kuat biasanya lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar, sehingga usahanya memiliki peluang bertahan dan berkembang. Dengan demikian, peningkatan kapasitas wirausaha menjadi strategi penting untuk memperluas basis ekonomi produktif dan mendukung pertumbuhan inklusif (Demirel & Babu Sahib, 2015).

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu manfaat utama dari penguatan Sumber Daya Insani (SDI). SDI yang kuat—ditandai oleh keterampilan, pendidikan, literasi finansial, dan karakter yang tangguh—membekali masyarakat dengan kemampuan untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi, seperti inflasi, resesi, kehilangan pekerjaan, atau perubahan struktur industri. Individu yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih fleksibel dalam beradaptasi, mampu mengalihkan keterampilan mereka ke sektor lain, serta lebih cepat mencari peluang baru ketika menghadapi krisis (Rohmana, 2022).

Selain itu, ketahanan ekonomi juga diperkuat oleh kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan bijak, termasuk membangun tabungan, diversifikasi pendapatan, serta meminimalkan utang berisiko tinggi. Dengan fondasi SDI yang solid, masyarakat tidak mudah terperosok ke dalam kemiskinan saat terjadi gangguan ekonomi (Demirel & Babu Sahib, 2015). Mereka menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu mempertahankan stabilitas pendapatan. Dengan demikian,

penguatan SDI berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih resilien dan siap menghadapi ketidakpastian ekonomi jangka panjang..

3. Literasi keuangan merupakan elemen kunci dalam penguatan Sumber Daya Insani (SDI) karena menentukan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait keuangan secara bijaksana. SDI dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi mampu menyusun perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, seperti kebutuhan konsumsi, tabungan, investasi, hingga persiapan dana darurat (Bank et al., 2021). Dengan pemahaman yang baik tentang instrumen keuangan—baik konvensional maupun syariah—mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, serta nilai-nilai yang dianut.

Selain itu, literasi keuangan yang baik membantu masyarakat menghindari risiko, seperti praktik pinjaman ilegal, jebakan utang konsumtif, serta investasi bodong (Ain et al., 2021). Individu yang memahami prinsip pengelolaan keuangan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming keuntungan cepat yang tidak rasional. Mereka cenderung lebih disiplin dalam pengeluaran, melakukan pencatatan keuangan, dan mempertahankan keseimbangan antara konsumsi dan produktivitas (Firmansyah, 2021).

Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs 1, literasi keuangan memiliki dampak langsung terhadap kestabilan ekonomi rumah tangga. Masyarakat yang melek finansial lebih mampu mempertahankan pendapatan, mengelola risiko, serta membangun aset produktif. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi strategi penting dalam membentuk SDI yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi..

SDI dan Pengentasan Kemiskinan: Jalur Pengaruh Tidak Langsung melalui Masyarakat Inklusif

Masyarakat inklusif merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkeadilan, karena memastikan seluruh kelompok—tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, maupun disabilitas—mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang (Rohmana, 2022). Dalam konteks ekonomi, inklusivitas membuka peluang kerja yang lebih luas melalui penciptaan lingkungan yang mendukung partisipasi semua individu dalam aktivitas produktif. Ketika kelompok rentan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan, maka kapasitas produktif masyarakat secara keseluruhan meningkat.

Selain itu, masyarakat inklusif memperluas akses terhadap modal dan sumber daya usaha. Kebijakan yang mendorong pemerataan pembiayaan, seperti kredit mikro, pembiayaan syariah berbasis bagi hasil, serta dukungan bagi usaha kecil, memungkinkan kelompok berpendapatan rendah membangun kegiatan ekonomi yang lebih stabil (G. Becker, 1993). Akses modal yang merata menjadi motor penggerak

mobilitas sosial, karena memberikan kesempatan bagi individu untuk keluar dari perangkap kemiskinan.

Inklusivitas juga berperan besar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang merupakan penyebab utama kemiskinan structural (Sen, 1999). Ketika kesenjangan mengecil, distribusi kesempatan menjadi lebih adil, sehingga proses pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu (Lidya & Akbar, 2013). Dengan demikian, masyarakat inklusif menjadi fondasi bagi pencapaian SDGs 1 dan penguatan SDI secara berkelanjutan. Kemiskinan berkurang signifikan ketika sistem sosial menurunkan hambatan seperti:

1. bias gender, artinya bias gender merujuk pada ketidakadilan perlakuan atau penilaian berdasarkan jenis kelamin, yang menyebabkan perempuan atau laki-laki tidak memperoleh kesempatan yang setara. Bias ini muncul dalam akses pendidikan, pekerjaan, upah, dan pengambilan keputusan. Dampaknya adalah terbatasnya potensi manusia yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi secara optimal (Report, n.d.).
2. diskriminasi pekerjaan, diskriminasi pekerjaan adalah perlakuan tidak adil terhadap individu dalam proses rekrutmen, promosi, atau penentuan upah berdasarkan faktor nonkompetensi seperti gender, usia, disabilitas, atau latar belakang etnis. Praktik ini menghambat kesempatan kerja yang setara, menurunkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja, serta memperparah kesenjangan sosial (Trimurti & Dhyana, 2025). Dalam konteks pembangunan inklusif, penghapusan diskriminasi kerja menjadi kunci untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang adil dan berkelanjutan
3. keterbatasan akses pendidikan, Keterbatasan akses pendidikan terjadi ketika individu tidak dapat menikmati layanan pendidikan yang layak akibat faktor ekonomi, geografis, sosial, atau budaya. Hambatan seperti biaya tinggi, minimnya fasilitas, jarak sekolah yang jauh, serta norma sosial yang membatasi kelompok tertentu menyebabkan rendahnya partisipasi belajar. Kondisi ini menghambat pengembangan kapasitas manusia, memperlebar kesenjangan sosial, dan meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi. Akses pendidikan yang merata menjadi prasyarat utama pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan (Alkire, 2015).
4. minimnya perlindungan sosial. Minimnya perlindungan sosial menciptakan kerentanan tinggi bagi rumah tangga berpendapatan rendah ketika menghadapi guncangan seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga kebutuhan dasar. Tanpa jaminan seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan, atau program pensiun, keluarga miskin terpaksa mengurangi konsumsi dasar, menarik anak dari sekolah, atau berutang dengan bunga tinggi. Kondisi ini memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial. Oleh karena itu, perluasan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menjadi elemen penting untuk

memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat serta mendukung pencapaian SDGs 1 (Comfort et al., 2019).

Integrasi SDI–Inklusivitas–SDGs 1 dalam Perspektif Islam

Dalam kerangka epistemologi Islam, manusia tidak hanya diposisikan sebagai makhluk spiritual, tetapi juga sebagai *khalifah fil-ardh* yang memiliki mandat peradaban (*civilizational mandate*) untuk membangun, memakmurkan, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Pembangunan manusia (*human development*) dalam pandangan Islam bukan semata proses meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga ibadah sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan kolektif (*maslahah ‘ammah*). Perspektif ini menjadikan setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI) memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam (Husain et al., 2024).

1. Pembangunan sebagai Bagian dari Tugas Kekhalifahan

Al-Qur’an memberikan landasan bahwa manusia diciptakan untuk mengelola bumi dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi sesama. Allah berfirman: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” (QS. Hud [11]: 61) (Departemen Agama RI, 2019). Ayat ini menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan bentuk nyata dari amanah kekhalifahan. Dalam konteks kontemporer, pembangunan manusia mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, keterampilan, literasi keuangan, dan akses terhadap kesempatan ekonomi. Ketika pembangunan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan struktural, maka proses tersebut menjadi bagian dari ibadah sosial yang bernilai tinggi (HAMKA, 1982).

2. Dimensi Ibadah Sosial dalam Pembangunan Manusia

Konsep ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual, tetapi menyangkut segala aktivitas yang bernilai kemaslahatan. Rasulullah SAW menegaskan: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad) (Al-Bukhari, 1987). Hadis ini mengandung prinsip bahwa pembangunan manusia harus diarahkan untuk menciptakan manfaat sosial yang luas. Ketika suatu masyarakat berupaya memberdayakan kelompok rentan, memperluas akses pendidikan, atau mengurangi kemiskinan, maka aktivitas tersebut tergolong amal saleh yang memiliki nilai ibadah. Karena itu, pembangunan manusia dalam perspektif Islam bukan sekadar upaya ekonomi, tetapi transformasi sosial yang didasarkan pada nilai keadilan, bantuan *mutual* (*ta’awun*), dan perlindungan terhadap kelompok lemah (Azwar, 2005).

3. Instrumen Ekonomi Islam untuk Inklusivitas dan Pemerataan Kekayaan

Islam menyediakan seperangkat instrumen distribusi kekayaan yang dirancang untuk mencegah penumpukan aset pada kelompok tertentu, sekaligus memperkuat inklusivitas ekonomi (Anggraini et al., 2018). Di antara instrumen paling strategis adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

(a) Zakat: Sistem Redistribusi Kekayaan yang Struktural

Zakat merupakan mekanisme wajib yang bertujuan mencegah kemiskinan struktural dan memastikan bahwa kekayaan mengalir menuju kelompok yang membutuhkan. Al-Qur'an menegaskan: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin..." (QS. At-Taubah [9]: 60) (Departemen Agama RI, 2019). Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat adalah instrumen resmi untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pada level pembangunan manusia, zakat dapat dialokasikan untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha, dan perlindungan sosial—formulasi yang selaras dengan SDGs 1 tentang pengentasan kemiskinan.

Zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Banyak literatur kontemporer menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, mendorong kemandirian ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan (Arifin, 2020).

(b) Infak dan Sedekah: Instrumen Fleksibel untuk Penguatan Komunitas

Infak dan sedekah merupakan instrumen sukarela yang memperluas ruang kontribusi masyarakat. Ini merupakan bentuk *social solidarity financing* yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial. Allah berfirman: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir..." (QS. Al-Baqarah [2]: 261) (Departemen Agama RI, 2019). Ayat ini menggarisbawahi bahwa infak dan sedekah memiliki multiplier effect sosial dan ekonomi. Dalam konteks SDI, infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk: (a) beasiswa pendidikan, (b) program peningkatan keterampilan, (c) bantuan modal mikro, (d) dukungan kesehatan dan nutrisi, € pemberdayaan perempuan dan difabel (Dikkaya, 2021). Dengan demikian, infak dan sedekah memperkuat fondasi inklusivitas dan memperluas jangkauan pembangunan manusia.

(c) Wakaf: Instrumen Berkelanjutan untuk Aset Publik dan Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang paling strategis untuk menciptakan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Wakaf telah melahirkan universitas, rumah sakit, pusat pelatihan, pasar, dan lembaga sosial sepanjang sejarah Islam. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah..." (Al-Bukhari, 1987). Wakaf produktif dapat diarahkan untuk: (1) pembangunan sekolah atau pusat Pendidikan; (2) rumah sakit komunitas; (3) pembiayaan usaha mikro, (4) pembangunan rumah layak huni dan (5) program ekonomi berbasis komunitas. Instrumen ini sangat relevan dalam pembangunan manusia karena meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, memperkuat modal sosial, dan menciptakan keadilan distributive (Anggraini et al., 2018).

4. Prinsip Ta'awun: Solidaritas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

Prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) merupakan fondasi pembangunan inklusif dalam Islam. Allah berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa...” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2) (Departemen Agama RI, 2019). *Ta'awun* menuntut masyarakat berperan aktif dalam mendukung kelompok lemah melalui: kerja sama komunitas, koperasi syariah, kemitraan usaha berbasis nilai, jaringan dukungan sosial, program pemberdayaan ekonomi kolektif (Chapra, 1992). Dalam konteks pembangunan manusia, prinsip ini meminimalkan ketergantungan dan memperkuat kemandirian. Komunitas yang menerapkan prinsip *ta'awun* cenderung lebih resilien terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial.

5. Pembangunan Manusia Islam dan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan)

Islam memberikan kerangka normatif yang sejalan dengan agenda global pengentasan kemiskinan. Setidaknya ada tiga integrasi utama:

1. Pemberdayaan SDI sebagai Prioritas Utama

Islam menekankan peningkatan akhlak, ilmu pengetahuan, keterampilan teknis, literasi finansial, kemandirian ekonomi. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, menjaga diri dari meminta-minta, dan membantu tetangga, maka ia bertemu Allah dengan wajah berseri pada hari kiamat.” (HR. Baihaqi) (Al-Bukhari, 1987). Hadis ini menegaskan pentingnya kerja produktif, kemandirian, dan kontribusi sosial, komponen inti SDI.

2. Distribusi Kekayaan yang Adil

SDGs menempatkan redistribusi sebagai mekanisme penting dalam mengurangi kemiskinan. Islam jauh lebih tegas dalam hal ini melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada kalangan tertentu (QS. Al-Hasyr [59]: 7) (Departemen Agama RI, 2019).

3. Sistem Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan

Konsep *kafalah*, *fi sabilillah*, dan jaminan sosial dalam *fiqh* menunjukkan betapa Islam memberikan prioritas bagi kelompok paling rentan. Negara dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab memastikan bahwa tidak ada individu yang dibiarkan jatuh dalam kemiskinan ekstrem (Chapra, n.d.).

Dengan demikian, Islam memandang pembangunan manusia bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi ibadah sosial yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan kolektif, dan kemaslahatan. Instrumen ekonomi Islam—zakat, infak, sedekah, dan wakaf—memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat inklusif dan mendukung pencapaian SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan). Prinsip *ta'awun* menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya negara. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan SDI dapat menghasilkan transformasi sosial yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Transformasi SDI merupakan pendekatan strategis yang menempatkan pengembangan kapasitas manusia sebagai inti dari upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan masyarakat inklusif. Transformasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan dimensi moral, sosial, dan spiritual yang membentuk karakter dan integritas individu. SDI yang berkualitas memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif, mengambil keputusan yang bijak, serta membangun relasi sosial yang harmonis. Kerangka konseptual SDI-Inklusivitas-SDGs 1 menegaskan bahwa kualitas manusia menjadi faktor penentu dalam menciptakan pembangunan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan pendidikan, literasi keuangan, keterampilan kerja, dan nilai-nilai etis, transformasi SDI mampu memperluas peluang ekonomi, memperkecil kesenjangan, dan memperkuat ketahanan sosial, sehingga berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan *Tanpa Kemiskinan*.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah perlu mengintegrasikan literasi keuangan, kewirausahaan, dan keterampilan digital dalam pendidikan nasional.
2. Program pengentasan kemiskinan harus memasukkan dimensi pemberdayaan SDI, bukan hanya bantuan tunai.
3. Institusi keagamaan dapat memperkuat pembinaan akhlak dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.
4. Lembaga pendidikan harus mengembangkan model pembelajaran berbasis nilai maqasid al-syari'ah.
5. Pemerintah daerah perlu mengembangkan ekosistem kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, V., & Sailesh, S. (2024). The Geography of Human Capital : Insights from the Subnational Human Capital Index in Indonesia. *Social Indicators Research*, 172(2), 673–702. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03322-x>
- Ain, N., Rosli, M., Dahlal, N., & Elgharbawy, A. A. M. (2021). An Introduction of Islamic Value-Based Productivity Framework. 9(4), 118–126.
- Al-azhar, T., Hidup, F., Hamka, B., Islami, E. B., Syariah, H. E., & Ekonomi, M. (2025). *PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Maisarah Muhammad Thaib Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia Email : 94maisarah@gmail.com*. 03(02), 164–176.
- Al-Bukhari. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- Alkire, S. (2015). *Sabina Alkire * The Capability Approach and Well-Being Measurement for Public Policy*.
- Anggraini, R., Airlangga, U., Rohmati, D., & Airlangga, U. (2018). *Maqāsid al-S hari ‘ ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam Tika Widiastuti Pendahuluan Saat ini banyak*

- orang mulai bergerak sporadis untuk memenuhi. 9, 295–317.
- Arifin, Z. (2020). The Growth Asset and Productivity. *Jurnal Bimas Islam* , 8(IV), 659–684.
- Asutay, M. (2025). Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance. *Global Policy*, 16(S1), 7–11. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487>
- Azwar, S. (2005). *Etika Ekonomi dalam Pemikiran Hamka: Analisis Moral Pembangunan Islam*. UII Press.
- Bank, A. M., Microfinance, Y., & Mamman, A. (2021). *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT The Role of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation : A Case*. 9, 171–181.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. 12(4), 88–110.
- Chapra, M. U. (n.d.). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī‘ah*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Comfort, B., Okodua, H., Oladosun, M., & John, A. (2019). Heliyon Human capital and poverty reduction in OPEC member-countries. *Heliyon*, 5(January), e02279. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02279>
- Dec, K., & Broniewicz, E. (2020). Energy Self-Sufficient Public Utility Building—Concept. 18. <https://doi.org/10.3390/proceedings2020051018>
- Demirel, S., & Babu Sahib, H. (2015). Concept of Barakah in Qur ’ ān and Sunnah : Towards its Realization in Modern Discourse Serdar Demirel * Hikmatullah Babu Sahib ** Kur ’ an ve Sünnet ’ te Bereket Kavramı : Modern Diskurda İdrakına Doğru. *FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 261–284.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an.
- Dikkaya, M. (2021). *Sosyoekonomi*. June. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08>
- Firmansyah, H. (2021). TEORI RASIONALITAS DALAM PANDANGAN ILMU EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.35194/eei.v1i1.1136>
- Fuaidi, I. (2024). Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(1), 95–108. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128>
- G. Becker. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*.
- Global, W. (2023). *WORLD DEVELOPMENT REPORT 2019*.
- Hamid, A. M. (2018). Islamic Governance in Islamic School Finance. *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v12i1.435>
- HAMKA. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Panjimas.
- Husain, M. Y., Siva, F., Al, H., Rizal, M., Habibi, Z., Brahmana, R., Achmad, M., Halidaziya, N., & Althof, M. D. (2024). Investasi Syariah : Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat di Indonesia. 4, 41–52.
- Ismawati Saragih. (2025). HAMKA’S PHILOSOPHY OF VALUES RELEVANCE AND CONTEMPORARY CHALLENGES IN MODERN INDONESIA. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC)*, 6(2), 128–137.
- Kahf, M. (n.d.). *THE ISLAMIC*.

- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lidya, R., & Akbar, D. A. (2013). Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam. *Nurani*, VOL. 1(13), 72.
- M. Kahf. (2003). *The Role of Waqf in Poverty Reduction*. IRTI.
- Melisa Tiran. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 180–188. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i3.735>
- Muhamed Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- OECD. (2021). *Inclusive Growth Framework*. OECD Publishing.
- Opoku, E., Poku, K., & Domeher, D. (2024). *Financial Inclusion , Human Capital Development and Economic Growth in Africa : An Examination of the Transmission Channel*. September, 1–19. <https://doi.org/10.1177/21582440241271285>
- Rahmawaty, A. (n.d.). *Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*. 1(1), 1–17.
- Report, W. D. (n.d.). *OF WORK*.
- Rohmana, Y. (2022). Consumption: Ethical Perspective of Islamic Economics. *Review of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 79–92. <https://doi.org/10.17509/rief.v5i1.52164>
- Rukyah. (2021). *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX: Pendekatan Kontribusi dan Interaksi dengan Variabel-variabel Makro Ekonomi di Indonesia* (Edisi Pert). Kencana.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trimurti, C. P., & Dhyana, U. (2025). *Impact economic growth, human capital, employment rate on poverty in indonesia*. 8(2021), 3078–3089.
- UNDP. (2022). *Human Development Report*. UNDP.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. yayasan Obor Indonesia.